



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal	: Senin / 19 Agustus 2024
Pukul	: 14.00 Wib
Tempat	: Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.
Pimpinan Rapat	: Supardi, SH
Pimpinan DPRD	: H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed
	: H. Suwirpen Suib, S.Sos
Notulis	: Fadhil Rifki Albisri, S.STP

Jumlah Anggota	:	65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi Partai Gerindra	:	14 Orang
2. Fraksi PKS	:	10 Orang
3. Fraksi Partai Demokrat	:	10 Orang
4. Fraksi PAN	:	10 Orang
5. Fraksi Partai Golkar	:	8 Orang
6. Fraksi PPP- NasDem	:	7 Orang
7. Fraksi PDI-P dan PKB	:	6 Orang

Hadir : Anggota DPRD yang hadir terdiri dari :

1. Ismunandi Syofyan, SE
2. Muchlis Yusuf Abit, ST, MM
3. H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Pt
4. Mario Syah Johan
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Jempol
7. Desrio Putra, ST
8. Mesra
9. Evi Yandri Rajo Budiman
10. Khairuddin Simanjuntak
11. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
12. H. Mochklaslin, S.Si
13. H. Muhammad Ridwan, S.IP
14. H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP
15. Budiman Dt. Malano Garang, S.Ag, MM
16. Drs. H. Asra Faber, MM
17. Rafdinal, SH
18. M. Ihpan
19. Ali Tanjung, SH
20. Suharjono
21. Hj. Aida, SH
22. Jefri Masrul, SE
23. H. M. Nurnas, ST
24. Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA
25. H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa, MM
26. Muhayatul, SE, M.Si
27. H. Maigus Nasir, S.Pd
28. Daswanto, SE

29. H. Dody Delvi, SE
30. H. Muzli M. Nur, S.Pd
31. Hj. Artati, SH, MH
32. H. Bukhari Dt. Tuo, SE
33. Zulkenedi Said, S.Sos, SH, M.Si, MM
34. DR. Hardinalis Kobal, SE, MM
35. Zarfi Deson, SH
36. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
37. Lazuardi Erman
38. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM
39. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
40. Sawal Dt. Putih, SH
41. Imral Adenansi, SH, MH
42. Bakri Bakar, SH
43. H. Taufik Syahrial

Eksekutif

: Gubernur Sumatera Barat
 Asisten III Setda Provinsi Sumatera Barat
 Inspektorat
 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
 Dinas Perkimtan
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
 Dinas Pangan
 Dinas Lingkungan Hidup
 Dinas Pendidikan
 Dinas Satpol PP
 Dinas Perhubungan
 Dinas Kesehatan
 Dinas Koperasi dan UKM
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Dinas Pemuda dan Olahraga
 Dinas Dinas ESDM
 Dinas Sosial
 Dinas Kominfo dan Statistik
 Dinas Kebudayaan
 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Badan Penelitian dan Pengembangan
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Badan Kepegawaian Daerah
 Badan Kesbangpol
 Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar
 Biro Kesra Setda Provinsi Sumbar
 Biro Umum Setda Provinsi Sumbar
 RSUD M. Natsir Solok
 RSUD Pariaman

BUMD

PT. Jamkrida Sumbar
 PT. Grafika Jaya Sumbar

Turut Hadir

- : A. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
 B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

IALANNYA RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan PT. Bank Nagari, Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024, dengan Agenda Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Juli 2024, pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024, diagendakan 2 (dua) rapat paripurna, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan rapat paripurna dalam rangka penetapan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berhubung belum keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan, maka penetapannya belum dapat dilakukan pada rapat paripurna ini dan akan diagendakan nanti kembali setelah keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pada hari ini kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada rapat paripurna tanggal 27 Juli 2024 yang lalu, DPRD bersama Gubernur Sumatera Barat telah menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Menindaklanjuti Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 yang disepakati tersebut, pada rapat paripurna tanggal 31 Juli 2024 yang lalu, Saudara Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati, proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, belum kredibel oleh karena target pendapatan yang diusulkan masih bersifat tentatif dan baru sebatas upaya untuk menyeimbangkan alokasi belanja yang dibutuhkan.

Kondisi ini disebabkan, oleh karena target pendapatan yang diusulkan pada APBD Tahun 2024 awal diprediksi tidak tercapai dan SILPA dari APBD Tahun 2023 juga tidak sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan kebutuhan belanja justru bertambah, oleh karena cukup banyak kegiatan yang bersifat mandatory, sisa DAK, sisa BOS dan hutang bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang harus dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Kondisi yang terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, sebelumnya juga terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023. Ini menunjukkan, bahwa pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, efektif dan efisien. Permasalahan ini, perlu menjadi perhatian dan catatan dari Pemerintah Daerah, agar penyusunan APBD berkualitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Memperhatikan kondisi yang terdapat dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka pembahasan lebih difokuskan pada upaya-upaya untuk menjadikan Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi lebih kredibel, berimbang antara pendapatan dan belanja, efektif dan tepat guna. Kondisi pembahasan tersebut, tentu berdampak sedikit banyaknya teradap kualitas Perubahan APBD Tahun 2024.

Meskipun dalam pembahasan terdapat peningkatan target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD, akan tetapi masih cukup untuk menjadikan neraca Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi berimbang. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan rasionalisasi, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak, kegiatan yang realisasinya masih rendah serta kegiatan pendukung seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan dan perawatan rutin serta kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pencapaian target kinerja RPJMD.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dan diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada siang hari ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada Rapat Paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD. Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD yang sekaligus merupakan Sekretaris Badan Anggaran kami persilahkan untuk membacakan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 (dibacakan oleh Sekretaris DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut ?

Setuju (sahutan hadirin sidang Paripurna) (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB (dibacakan oleh Sekretaris DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Setuju (sahutan hadirin sidang Paripurna) (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD dan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 17/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan dan ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka acara rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur, kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur terhadap Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

1. Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Yth. Rekan-rekan Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
3. Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Opd, Biro, Rsd, Dan Bumd Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Yth. Rekan-Rekan Pers Media Cetak dan Elektronik serta Hadirin yang terhormat.

Alhamdulillah,

sega

la puji dan syukur senantiasa kita sembahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat menyelesaikan proses pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Shalawat dan salam bagi junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan bagi umat manusia untuk keselamatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dan DPRD telah melaksanakan proses dan tahapan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dimana pada tahapan sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 120-155/GSB-2024 dan Nomor 120-8-2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan Nomor 120-156/Gsb-2024 dan Nomor 120-9-2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Pada tahapan berikutnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Di tengah keterbatasan fiskal yang kita alami saat ini kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini serta untuk kebutuhan lainnya yang bersifat strategis, sehingga kebutuhan tersebut tetap dapat kita penuhi.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan perhatian dalam proses pembahasan dan persetujuan prinsip yang telah diberikan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 27 Juli 2024 yang lalu yang menjadi acuan kita dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini.

Dari berbagai tahapan persidangan yang telah diselenggarakan, mulai dari tahapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sampai tahapan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024 hari ini, kita telah berusaha untuk senantiasa menggunakan prinsip-prinsip penganggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu efisien, efektif, disiplin, transparan dan akuntabel serta kewajaran dan kepatutan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Gambaran umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan, total Perubahan APBD sebesar 7,037 triliun rupiah mengalami kenaikan 199,503 miliar rupiah dari APBD awal sebesar 6,838 triliun rupiah. Kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat mengalami defisit sebesar 160,447 miliar rupiah yang merupakan selisih belanja daerah dan pendapatan daerah. Defisit tersebut sesuai ketentuan ditutupi dengan Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud bersumber dari Silpa tahun sebelumnya sebesar 180,447 miliar rupiah yang merupakan hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2023.

Jumlah Silpa sebagaimana dimaksud, di dalamnya terdapat Silpa Earmark yang berasal dari Dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, sisa Dana Bos, sisa Dana Bantuan Keuangan Kab/Kota, dan sisa BLUD. Disamping hal tersebut juga terdapat kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya lewat tahun anggaran dan dianggarkan kembali pada tahun 2024, utang belanja/ pekerjaan yang harus dibayarkan pada tahun 2024, pekerjaan yang sudah ada berita acara serah terima (bast) tetapi belum dibayarkan pada tahun 2023 serta utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/ Kota yang harus dibayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: total Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 6,857 triliun rupiah, Belanja Daerah sebesar 7,017 triliun rupiah, defisit sebesar 160,447 miliar rupiah, dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 6,857 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 4,11% dari APBD awal sebesar 6,586 triliun rupiah. sumber pendapatan tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar 3,348 triliun rupiah naik sebesar 7,38% atau sebesar 230,041 miliar rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah.

- Pendapatan Transfer yang dalam APBD 2024 awal ditargetkan sebesar 3,451 triliun rupiah, pada Perubahan APBD 2024 ini naik sebesar 1,17% atau sebesar 40,458 miliar rupiah sehingga menjadi 3,491 triliun rupiah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah hal. 10 dari 15 ditargetkan sebesar 17,024 miliar rupiah pada APBD awal tidak mengalami kenaikan sehingga tetap sebesar 17,024 miliar rupiah pada Rancangan Perubahan APBD.

b. Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, direncanakan sebesar 7,017 triliun rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 119,503 miliar rupiah atau naik sebesar 2,93% dari Belanja Daerah pada APBD awal sebesar 6,818 triliun rupiah. Total belanja tersebut dapat dirinci menurut kelompok belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, sebesar 4,800 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD awal sebesar 4,686 triliun rupiah.
2. Belanja Modal pada Perubahan APBD direncanakan sebesar 881,594 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 12,62% atau sebesar 98,801 miliar rupiah dari anggaran pada APBD awal sebesar 782,793 miliar rupiah.
3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 18,820 miliar rupiah, turun sekitar 59,91% atau sebesar 28,112 miliar rupiah dari yang dianggarkan pada APBD awal sebesar 46,942 miliar rupiah.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar 1,316 triliun rupiah, naik 1,17% atau sebesar 15,215 miliar rupiah dari APBD awal sebesar 1,301 triliun rupiah.

c. Pembiayaan Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang telah disepakati, penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun lalu, atau tahun 2023, sebesar 180,447 miliar rupiah, sesuai dengan audit BPK RI atas LKPD tahun 2023, sehingga terjadi penurunan sebesar 70,996 miliar rupiah atau turun sebesar 28,24% dari APBD awal sebesar 251,444 miliar rupiah.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Setelah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 tahapan lagi yang harus kita lalui, **Pertama** Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah kita setuju bersama sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, **kedua** kita harus menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan **ketiga** menyusun DPPA-SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Kita sudah berupaya dengan segala daya, dan dengan segala kemampuan yang ada untuk memacu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan, namun tentu masih ada hal-hal yang belum dapat kita penuhi. Keadaan demikian disebabkan karena sumber-sumber dana yang terbatas dibandingkan dengan tanggungjawab dan tugas Pemerintah Daerah yang semakin kompleks, juga karena meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat terutama sekali dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Saran, masukan dan kritikan dari Fraksi-Fraksi DPRD yang telah disampaikan, semaksimal mungkin telah kita akomodir dan kita sempurnakan walaupun belum memenuhi seluruh keinginan yang telah disampaikan tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa rangkaian persidangan yang telah dilaksanakan sampai dilahirkannya Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini tentunya menguras energi dan fikiran kita bersama sebagai wujud tanggungjawab kita dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas terjalannya kerjasama yang baik selama ini. semoga niat ikhlas dan ikhtiar kita ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, serta memperoleh ridha dan berkah hendaknya dari Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamith tharik, fastabikhul khairat, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pendapat Akhir/sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Bersama, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang sudah kita sepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi, sehingga realisasinya dapat pula segera dilaksanakan. Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2024 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2024 ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, merupakan pembahasan anggaran terakhir yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 bersama dengan

Pemerintah Daerah. Kami menyadari, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat.

Masih banyak aspirasi yang disampaikan oleh konstituen, baik dari pelaksanaan reses maupun yang disampaikan langsung kepada Lembaga yang belum dapat kami perjuangkan. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh kesengajaan, akan tetapi banyak permasalahan yang menyebabkan belum terakomodirnya aspirasi tersebut, seperti kewenangan, keterbatasan fiskal serta belum sejalanannya usulan dengan program prioritas daerah.

Untuk itu, dari hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tersebut. Selanjutnya, kepada Pemerintah Daerah, TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga menyampaikan permohonan maaf, oleh karena dalam pembahasan, baik ditingkat komisi maupun ditingkat Badan Angggara, tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan bahkan sering terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa perbedaan dan pertentangan yang terjadi tersebut, semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas hasil pembahasan, agar terwujud APBD yang kredibel, akuntabel, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada sore hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD, TAPD dan OPD-OPD yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.

Selanjutnya, kami menyampaikan juga permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan pembahasan dan pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan membacakan "Alhamdulillahirabbil'alamiin" Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih Wabillahi taufiq walhidayah Wass. Wr. Wb

Pimpinan Rapat,



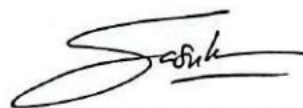
SUPARDI, SH

Sekretaris DPRD,



H. RAFLIS, SH, MM

Pembuat Risalah,



FADHIL RIFKI ALBISRI, S.STP